

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum (pemilu) sebagai proses sarana kedaulatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilu, dimana warga negara memilih wakil-wakilnya di pemerintahan, baik di tingkat nasional, pemilihan umum meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil rakyat yang terdiri dari anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu ini dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua ini dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yang melibatkan warga negaranya untuk ikut serta dalam proses pemberian suara. Dengan syarat-syarat agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Benu Pandubrata Judasubrata 2023). Selanjutnya menurut (Kanya Anindita Mutiarasari 2023) menjelaskan pemilihan ditingkat daerah yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan umum kepala daerah mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang semuanya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Saat ini, di Indonesia pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat yang tinggal di wilayah administratif setempat dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Penggunaan hak pilih pada pemilu maupun pada pemilihan kepala daerah, yaitu tindakan atau proses dimana masyarakat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon atau partai dalam pemilihan umum. Penggunaan hak pilih pada pemilu maupun pilkada itu sangat penting. Partisipasi merupakan indikator, dengan semakin tingginya partisipasi, berarti hasil pemilu lebih *legitimate* peran serta masyarakat dalam memilih pemimpin berarti antusiasnya tinggi serta aspirasinya bisa terwujud untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas. Hak pilih yaitu hak yang melekat pada setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Tindakan hak pilih ini memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan yang

representatif dan mengakui kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Supriadi Lawani 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yaitu salah satu cara untuk mempengaruhi kebijakan politik, dengan tujuan mengawal proses pelaksanaan pemilihan umum agar pemimpin dan wakilnya yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat melalui proses yang jujur dan adil. Oleh karena itu partisipasi dalam pemilu menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi dalam pemilu dianggap sebagai tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat agar bisa menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pada saat pemilu itu hari libur atau hari yang diliburkan. Ketika saat pemilu itu libur tujuannya agar masyarakat bisa berpartisipasi dan datang ke TPS untuk mencoblos atau memilih. Meskipun penggunaan hak pilih memiliki nilai positif yang signifikan dalam konteks demokrasi, tantangan seperti golput dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan. Oleh karena itu, pemahaman dan pemecahan masalah terhadap hambatan ini menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem demokratis (Bawaslu 2019).

Kemunculan golongan putih (golput) pada pemilu ini awalnya disebabkan bentuk perlawanan yang berawal dari gerakan protes pada sistem politik yang tidak demokratis pada pemerintahan orde baru. Namun pada era saat ini istilah golongan putih (golput) ada pergeseran (ACLC KPK 2023). Selanjutnya Menurut (Haris Alfarisi 2023) karena warga negara merasa tidak memiliki pilihan dari kandidat yang maju sebagai calon pemimpin, serta tidak mempercayai terhadap politik. Masyarakat menyadari bahwa pemilu yang diselenggarakan akan berdampak dan memberi perubahan pada hidup mereka. Rasa enggan timbul pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, kepala daerah, maupun legislatif, muncul karena kecewa terhadap sistem politik yang ada dan perasaan bahwa pemilu tidak memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan mereka. Maka dari itu upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih harus terus dilakukan terhadap pemilu khususnya tentang penggunaan hak

pilih, agar sistem politik dapat memberikan perspektif yang positif dan tidak diasumsikan negatif.

Berdasarkan fenomena golongan putih (golput) di Indonesia, khususnya di tingkat Kota Bandung tersebut. Golput menjadi tantangan bagi proses demokrasi karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan mengurangi keterwakilan suara rakyat. Masyarakat kurang antusias terhadap pemilu tersebut khususnya pilkada. Sikap dari masyarakat yang enggan untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada serta partisipasi untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berjalan dengan baik. Maka dari itu permasalahan ini dibuatlah rancangan berjenis persuasi sosial atau kampanye mengenai fenomena golput pada pilkada. Hasil perancangan bertujuan untuk mencari simpati serta kesadaran dari masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilihan kepala daerah sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada dan tidak golput. Dengan begitu berharap masyarakat adanya kesadaran terhadap pemilu serta antusiasnya yang tinggi dengan berpartisipasi untuk menyambut demokrasi yang sehat dan baik, serta bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai keinginan pilihannya.

## **I.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Adanya golongan putih (golput) pada pilkada di tingkat Kota Bandung yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai partisipasi terhadap demokrasi.
- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pada pemilu khususnya pilkada di tingkat Kota Bandung menjadikannya golput.
- Karena masyarakat di wilayah Kota Bandung merasa tidak memiliki pilihan dari kandidat yang maju sebagai calon pemimpin yang menyebabkan terjadinya golput.
- Terjadinya golongan putih (golput) dikarenakan rasa kecewanya terhadap sistem politik yang ada dan pemilu tidak banyak memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat di wilayah Kota Bandung.

- Memerlukan informasi melalui media yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

### **I.3. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah atas permasalahan ini yang diambil dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu:

- Bagaimana caranya merancang kampanye persuasi sosial agar muncul kesadaran dan perubahan perilaku dari masyarakat Kota Bandung untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu kepala daerah (pilkada) sebagai tanggung jawab dan tidak golput?

### **I.4. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka masalah dalam perancangan harus dipersempit dalam kasus ini terhadap penggunaan hak pilih pada pemilu khususnya pilkada. Batasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada objek golongan putih (golput) yang dirancang untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan luas. Maka dari itu membatasi beberapa permasalahan, yaitu:

- Terjadinya golongan putih (golput) pada pilkada di wilayah Kota Bandung.

### **I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan**

Adapun uraian masalah yang terdapat dari latar belakang diatas, antara lain tujuan dan manfaat perancangan ini adalah sebagai berikut:

#### **I.5.1. Tujuan Perancangan**

- Perancangan ini diharapkan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada di wilayah Kota Bandung dan tidak golput.
- Memberikan kesadaran terhadap masyarakat di wilayah Kota Bandung agar bisa datang ke TPS dan memilih calon pemimpin yang baik sesuai keinginannya sendiri.

- Mempersuasikan agar partisipasi terhadap demokrasi pada pemilu khususnya pilkada lebih banyak lagi yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Kota Bandung.
- Untuk mengurangi golput pada pilkada di wilayah Kota Bandung.

### **I.5.2. Manfaat Perancangan**

Dari perancangan yang akan dibuat, berharap dapat memberi manfaat berupa:

- Meningkatkan kesadaran pentingnya penggunaan hak pilih pada pemilu yaitu pada pilkada agar bisa menentukan calon pemimpin yang berkualitas dan pro rakyat.
- Mengetahui faktor penyebab dari fenomena golput pada pilkada.
- Membantu pihak-pihak terkait dalam upaya terhadap fenomena golput, agar sistem politik dapat memberikan perspektif yang positif bagi masyarakat.
- Mengetahui terhadap ciri-ciri golput pada pemilu.
- Menjadikan kesadaran dari sikap pemilih agar lebih peduli terhadap sistem demokrasi pemilu.